

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA TELAGA SEWU DI DESA DUREN SEWU KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN

M. Daimul Abror¹ dan Junari²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri

daimabrор@unik-kediri.ac.id

junari@unik-kediri.ac.id

Abstract: This research describes, analyzes and interprets collaborative governance in the form of a partnership pattern between the Village Government, the Private Sector and the Community in the development of Telaga Sewu Tourism in Duren Sewu Village, Pandaan District, Pasuruan Regency. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The results of the research show that the basis or reason for the partnership between the Village Government, the Private sector and the Community in developing Telaga Sewu Tourism in Duren Sewu Village is political reasons, all parties entered into a partnership based on the interest of gaining profits. The village government can improve the realization of a democratic government, while the private sector can increase income and the community can increase family income or economy. Then there are economic reasons, where partnerships are implemented to improve the welfare of the Duren Sewu community, reduce inequality and poverty and increase income. Meanwhile, for administrative reasons, the village government entered into a partnership because it was constrained by a lack of budget for developing Telaga Sewu tourism, while the private sector entered into a partnership because they did not have complete equipment and recruited people as employees at Telaga Sewu Tourism due to a lack of natural resources. Meanwhile, the partnership pattern between the village government, the private sector and the community in developing Telaga Sewu tourism in Duren Sewu Village is more inclined towards a mutualistic partnership pattern.

Keyword: Collaborative, Governance, Tourism Development.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan collaborative governance dalam bentuk pola kemitraan antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan dasar atau alasan terjadinya kemitraan antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu yaitu alasan politik, semua pihak melakukan kemitraan atas dasar kepentingan mendapatkan keuntungan. Pemerintah Desa dapat meningkatkan mewujudkan Pemerintah yang demokratis, sedangkan swasta dapat meningkatkan penghasilan dan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan atau perekonomian keluarga. Kemudian alasan ekonomis, dimana kemitraan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Duren Sewu, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan. Sedangkan alasan administratif, Pemerintah desa melakukan kemitraan karena terkendala kekurangan anggaran

pembangunan wisata Telaga Sewu, Sedangkan swasta melakukan kemitraan dikarenakan tidak memiliki alat yang lengkap serta merekrut masyarakat sebagai karyawan di Wisata Telaga Sewu dikarenakan kurangnya sumber daya alam. Sedangkan Pola Kemitraan antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu lebih condong pada pola kemitraan mutualistik

Kata Kunci: Kolaborasi, Tata Kelola Pemerintahan, Pengembangan Pariwisata.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik keanekaragaman hayati maupun peninggalan-peninggalan sejarahnya. Melimpahnya sumber daya alam yang ada menjadikan sektor yang strategis dalam peningkatan perekonomian masyarakat apabila dimanfaatkan dengan bijak dan kreatif. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yaitu pembangunan kepariwisataan yang menggunakan daya tarik dari kekayaan alam yang indah, kemajemukan seni budaya, keragaman fauna dan flora, serta peninggalan purbakala. Pariwisata merupakan pendukung produktivitas individu dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di wilayah daerah. Dengan menjadikan wisata atau objek wisata, maka dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah sehingga dapat meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks sifatnya (P. Wahono, dkk, 2017). Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pariwisata merupakan semua kegiatan perjalanan dengan cara berkeliling-keliling dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan didukung dengan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam usaha pengembangan sektor wisata, maka dibutuhkan kemitraan atau kerjasama melalui pendekatan dengan organisasi pariwisata yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Menyatunya peran ketiga *stakeholders* ini sangat dibutuhkan sebagaimana searah dengan konsep *Collaborative Governance*, bahwa dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tidak lagi di dominasi oleh pemerintah saja. Tetapi lebih menunjukkan adanya pola kerjasama yang baik antar elemen yang ada, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah jika melaksanakan pembangunan secara sepihak.

Kemitraan dapat dibentuk apabila mempunyai syarat, yaitu : (1) Ada dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan (2) Mempunyai visi yang sama dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kapasitas (3) Ada kesepakatan

antara pihak satu dengan yang lain (4) Saling membutuhkan. Dengan adanya syarat tersebut diharapkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik dalam pengembangan sektor pariwisata secara bersama-sama. Peran masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata menjadi pilar yang utama karena masyarakat dalam hal ini memberi dukungan dalam berbagai program pariwisata yang telah direncanakan dan swasta secara profesional menyediakan jasa pelayanan dalam pengembangan pariwisata, sedangkan pemerintah yang mengeluarkan kebijakannya.

Sehubungan dengan kemitraan dalam pengembangan wisata, salah satu daerah di Indonesia yang berpotensi pariwisata yang giat melakukan kemitraan dalam peningkatan pengembangan wisata, yaitu Kabupaten Pasuruan yang berada di provinsi Jawa Timur. Sektor pariwisata dinilai memiliki *multiplier effect* yang tinggi sehingga dapat dijadikan upaya strategis untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif di sekitar obyek wisata serta dapat menumbuhkan kembangkan daerah sentra-sentra ekonomi kerakyatan. Potensi pariwisata di Kabupaten Pasuruan ini dikelola oleh Dinas/Pemerintahan dan dikelola oleh Daerah/Desa. Adapun salah satu wisata yang dikelola oleh Daerah/Desa yaitu wisata Telaga Sewu yang terletak di Dusun Klagen Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Telaga Sewu ini merupakan potensi yang dimiliki oleh Desa Duren Sewu dengan sumber air yang melimpah, dengan luas kolam pemandian Telaga Sewu ± 1 Ha, dan total luas Wisata Telaga Sewu adalah ± 3.000 m². Hal inilah yang menjadikan Telaga Sewu sebagai desa wisata karena mencerminkan keaslian desa. Dimana awal pemanfaatan Telaga Sewu ini untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi pertanian karena lahan disana kurang subur dan struktur tanah yang berpasir serta berbatu dan kandungan lumpur yang sedikit. Kemudian pemerintah desa dan pihak Wisata Telaga Sewu melakukan upaya menata dan melakukan pembangunan-pembangunan didalamnya. Telaga Sewu ini ada sejak tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2006.

Wisata Telaga Sewu Pandaan merupakan salah satu tempat wisata yang dikelola dan dikembangkan oleh Desa Duren Sewu yang menggunakan konsep kolam renang alami digabungkan dengan wahana permainan seperti kereta kelinci, arena berkuda, sepeda air, pesawat dan terapi ikan. Terdapat 5 kolam renang tanpa bahan kimia kaporit sehingga aman bagi kesehatan kulit dan bisa di nikmati mulai dari anak-anak sampai dewasa. Fasilitas di wisata Telaga Sewu ini sudah memadai, antara lain terdapat area parkir yang cukup luas baik itu parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan bus pariwisata, tersedianya ruang tunggu yang luas dan nyaman, adanya musholla, dan tersedianya kamar mandi yang cukup banyak, dan tersedia warung-warung sederhana apabila pengunjung merasa lapar dan haus, serta tersedianya *outbound* dan bumi perkemahan yang di pandu oleh *trainer* profesional dan berpengalaman yang siap melayani pengunjung.

Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada dasar pertimbangan kemitraan antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu; dan Pola kemitraan antara pemerintah desa, swasta dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu.

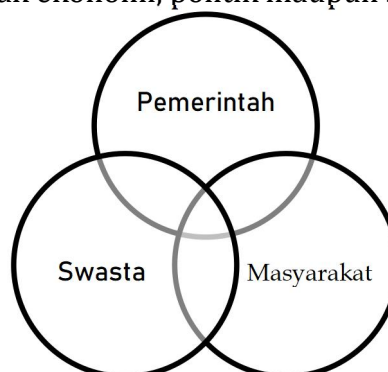
Kerangka Teori

Collaborative Governance

Dalam usaha pengembangan sektor wisata, dibutuhkan kemitraan atau kerjasama melalui pendekatan *collaborative governance* yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Menyatunya peran ketiga *stakeholders* ini sangat dibutuhkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tidak lagi di dominasi oleh satu pihak saja, melainkan adanya sinergitas yang baik antar elemen yang ada, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam *governance* melibatkan 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintah), *Private sector* (sektor swasta), dan *society* (masyarakat). Dimana ketiganya saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, *society* berperan positif dalam interaktif sosial, ekonomi politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (La Ode Syaiful Islamy, 2018). Secara konseptual untuk mewujudkan kolaborasi antara ketiga domain tersebut perlu adanya pembangunan visi bersama, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan terwujudnya kemitraan (*partnership*) yang saling menguntungkan diantara *stakeholders* untuk upaya mengatasi kesenjangan yang ada (La Ode Syaiful Islamy, 2018).

Dalam kolaborasi ini tidak hanya pemerintah saja yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintah melainkan bergeser pada peran swasta dan masyarakat . Kolaborasi ini menekankan pemerintah berinteraksi secara kondusif dalam kesetaraan dan keseimbangan dengan swasta dan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial.



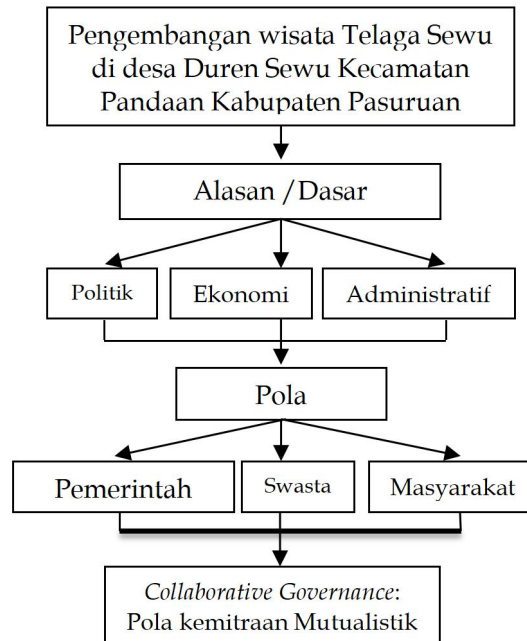
Gambar 1 Hubungan antar domain

Sumber: (Widodo, 2001)

Kemitraan dapat dibentuk apabila mempunyai syarat (Sulistiyani, 2004), yaitu: 1) Ada dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan; 2) Mempunyai visi yang sama dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kapasitas; 3) Ada kesepakatan antara pihak satu dengan yang lain; 4) Saling membutuhkan. Adapun tujuan kemitraan yaitu (Rudi et al., 2017): 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat; 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; 3) Meningkatkan pemeran dan pemberdayaan masyarakat; 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional; 5) Memperluas kesempatan kerja; 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Kemitraan antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu adanya pertimbangan atau alasan kemitraan dilakukan, antara lain (Saputra et al., 2019): 1) Politik, yaitu mendorong pemerintah mewujudkan *good governance* dan pemerintah yang demokratis; 2) Ekonomis, yaitu mengurangi kesenjangan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas serta mengurangi resiko; 3) Administratif, yaitu terjadinya kekurangan atau keterbatasan sumber daya pemerintah seperti halnya dalam kurangnya anggaran, kemampuan manajemen, Sumber Daya Manusia (SDM) serta aset yang dimiliki.

Dalam implementasi kemitraan, maka diperlukan adanya pola kemitraan yang sesuai dengan tujuan dan kondisi kemitraan. Adapun pola kemitraan (Melyanti, 2014) antara lain ialah: 1) Kemitraan Semu (*pseude partnership*), merupakan kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Dalam kemitraan ini sesungguhnya suatu pihak belum tentu memahami tujuan dan manfaat yang telah disepakati hanya saja cuma merasa penting melakukan kerjasama; 2) Kemitraan Konjugasi (*conjugation partnership*), merupakan kerjasama yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dalam kemitraan ini melakukan pembelahan diri dengan tujuan untuk mendapatkan energi dan meningkatkan kemampuan masing-masing, akan tetapi memiliki kelemahan dalam melakukan usaha dan mencapai tujuan organisasi; 3) Kemitraan Mutualistik, merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan keuntungan dan mendapatkan keuntungan lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Dalam kemitraan ini dua pihak atau lebih sama-sama memahami nilai pentingnya melakukan kerjasama sehingga dapat memudahkan dalam mewujudkan visi dan misi dan menunjang satu sama lain.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran Kemitraan

Sumber: Hasil olahan penulis, 2022

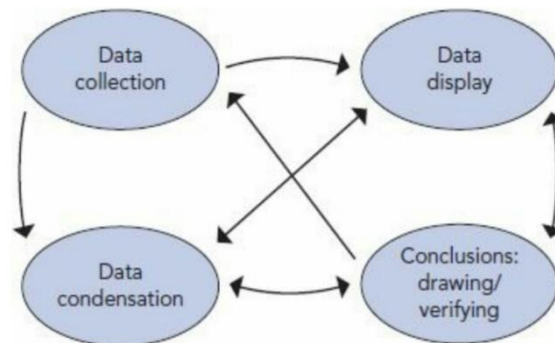
Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tekni pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Sumber data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang dianggap relevan dan memahami permasalahan yang ingin ditemukan dalam penelitian.

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (JDIH BPK RI, 2014) serta Peraturan Bupati Pasuruan nomor 28 tahun 2015 tentang Kebijakan strategis pembangunan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2018 (JDIH Kabupaten Pasuruan, 2009), dan dokumen atau arsip desa duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, MoU Kemitraan Pemerintah desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 2 tahun 2010 tentang Kerjasama Desa (JDIH Kabupaten Pasuruan, 2010), Swasta dan masyarakat, serta literature-literature terkait kemitraan pengembangan wisata.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis data model interaktif yang digagas oleh (Miles et al., 2018), meliputi: Kondensasi Data, dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung pada aktor-aktor yang terlibat dalam kemitraan pengembangan wisata Telaga Sewu mengenai dasar/alasan dan pola

kemitraan yang sudah dilaksanakan. Penyajian Data, dengan memaparkan hasil temuan penelitian terkait alasan politik, alasan ekonomi, dan alasan administratif dalam pelaksanaan kemitraan serta pola kemitraan yang terbentuk dalam pengembangan wisata Duren Sewu tersebut. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, dilakukan untuk menyimpulkan data-data atau informasi-informasi yang ditemukan selama penelitian terkait pola kemitraan dalam pengembangan wisata.



Gambar 3 Model Analisis Data Interaktif

Sumber: (Miles et al., 2018).

Pembahasan

Landasan analisis penelitian ini menggunakan teori bahwasannya kemitraan antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat perlu tiga pertimbangan utama dalam melaksanakan sebuah kemitraan, (Saputra et al., 2019) yaitu:

a. Alasan Politis

Alasan politik mendorong pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis (Saputra et al., 2019). Dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa semua pihak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pihak pemerintah Desa melakukan kemitraan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Telaga Sewu dengan cara membuka saham untuk masyarakat Desa Duren Sewu yang dibuka dengan dua tahap, yaitu tahap pertama yang diikuti oleh 30 orang penanam saham dengan sebesar saham Rp. 1.000.000/saham dan tiap orang penanam saham tidak hanya menanam satu saham saja tapi rata-rata lima sampai sepuluh saham. Kemudian tahap kedua, dalam tahap kedua ini penanam saham bertambah 20 orang penanam saham yang totalnya menjadi 50 orang penanam saham sampai sekarang.

Sedangkan pihak swasta melakukan kemitraan ini untuk meningkatkan penghasilan yang didapat dan lebih terkenal kepada masyarakat luar karena dengan kemitraan ini pengunjung semakin bertambah banyak. Pihak swasta disini yaitu provider *outbound*, yang sekarang ini ada 12 provider *outbound* yang telah melakukan kemitraan di Wisata Telaga Sewu, diantaranya Lawu

Adventure, Sherpa Camp, AFG dll. Di Wisata Telaga Sewu ini provider-provider di sediakan fasilitas yang cukup lengkap dan provider dapat penghasilan lebih banyak dengan dibuktikan adanya pengunjung yang *repeat order* hingga 3 kali.

Adapun masyarakat melakukan kemitraan ini untuk meningkatkan pendapatan dan dapat berpartisipasi dalam pengembangan wisata Telaga Sewu. Yang mana sebelumnya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam hal apapun terutama dalam hal pengembangan potensi desanya. Dengan ini masyarakat menjadi lebih peduli dengan potensi yang dimiliki desanya dan ikut serta dalam pengembangannya terutama dalam membangun pengembangan Wisata Telaga Sewu serta merasakan keuntungannya dari hasil ini.

Sehingga secara politis, kemitraan yang dijalankan dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu dilakukan untuk mencari keuntungan dan saling memiliki kepentingan satu sama lain dan sudah dirasakan oleh semua pihak baik Pemerintah Desa, swasta maupun masyarakat

b. Alasan Ekonomi

Ke dua, alasan ekonomis yaitu melakukan kemitraan dengan dasar pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas serta mengurangi risiko (Saputra et al., 2019). Kemitraan dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu juga mempunyai dasar pertimbangan ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Duren Sewu dengan membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Duren Sewu dengan merekrut masyarakat Desa Duren Sewu menjadi karyawan di Wisata Telaga Sewu dan peluang usaha bagi masyarakat pada sektor perdagangan dengan cara mengizinkan masyarakat untuk berjualan di arena Wisata Telaga Sewu sehingga mengurangi pengangguran. Akan tetapi penjual yang ada di dalam arena Wisata Telaga Sewu khusus bagi orang-orang pemilik saham dengan mayoritas dari Dusun Klagen yang berjumlah 11 orang penjual. Sedangkan penjual yang ada di luar arena Wisata Telaga Sewu terdapat 9 orang penjual yang berasal dari masyarakat Desa Duren Sewu sendiri. Masyarakat Desa Duren Sewu melakukan kemitraan ini juga dapat memperbaiki perekonomian dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, hasil pendapatan dari Wisata Telaga Sewu juga di distribusikan kepada anak yatim dan ibu janda dengan biaya bantuan sebesar Rp. 500.000/bulan dan ada 7 anak yang mendapatkan bantuan bersekolah SD-SMP. Selain itu, Pemerintah Desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi Rp. 8.000.000/bulan dan pajak daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebesar Rp. 3.000.000/bulan.

Sedangkan pihak Wisata Telaga Sewu mendapatkan penghasilan yang stabil dengan menjalankan kemitraan dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dari data pendapatan yang disebutkan

dari tahun 2021 sampai bulan april 2022 terakhir setiap bulannya mengalami pendapatan yang stabil dengan besar pendapatan mulai dari Rp. 200.000.000 - 600.000.000/bulan.

Sehingga pertimbangan secara ekonomis, kemitraan yang dijalankan selama ini dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas.

c. Alasan Administratif

Yang terakhir alasan administratif yaitu alasan administrasi adalah melakukan suatu kemitraan dengan dasar pertimbangan terjadinya kekurangan atau keterbatasan sumber daya pemerintah seperti halnya kurangnya anggaran, kemampuan manajemen, sumber daya manusia (SDM) serta aset yang dimiliki (Saputra et al., 2019). Alasan administratif kemitraan yang dijalankan ini dikarenakan terdapat kendala dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu yaitu kurangnya anggaran untuk pembangunan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Maka anggaran tersebut di dapat dari melakukan kemitraan dengan masyarakat, selain agar masyarakat ikut partisipasi dalam pengembangan potensi desa juga agar mendapatkan anggaran tambahan untuk pembangunan Wisata Telaga Sewu dengan cara mengajak masyarakat untuk menanam saham yang hasilnya akan dikeluarkan setiap tahunnya.

Selain itu, Pihak Wisata Telaga Sewu juga melakukan kemitraan dengan Pemerintah desa dengan menyewa tanah kas desa yang dipergunakan sebagai lahan parkir kendaraan dengan waktu sewa selama 20 tahun dengan sebesar uang sewa Rp. 1.050.000/1.000 m²/tahun dan setiap tahun ada kenaikan sebesar 6%. Dan apabila sudah jatuh waktu maka tanah tersebut diserahkan kembali kepada Desa dengan keadaan baik seperti semula bukan dalam keadaan rusak.

Sedangkan pihak swasta dari provider-provider *outbound* melakukan kemitraan atas dasar pertimbangan karena tidak mempunyai alat *outbound* yang lengkap sedangkan di Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ini mempunyai alat *outbound* yang dibutuhkan sudah cukup lengkap dan tempat yang luas untuk melakukan *outbound*. Bang Firman selaku provider *outbound* *Flymbre* juga menjelaskan alasannya melakukan kemitraan dengan Wisata Telaga Sewu ini semata-mata karena keterbatasan alat *outbound* yang dimilikinya, sedangkan Wisata Telaga Sewu telah menyediakan alat-alat yang cukup lengkap dan melayaninya dengan baik agar pihak swasta bersedia melakukan kemitraan dalam jangka waktu panjang.

Adapun dasar pertimbangan karena kurangnya sumber daya manusia, Pemerintah Desa merekrut masyarakat Desa Duren Sewu untuk menjadi karyawan di Wisata Telaga Sewu yang ditempatkan di berbagai bidang diantaranya Kabag permainan, team loket, team penolong dll. Sedangkan untuk kemampuan manajemen, Wisata Telaga Sewu merekrut karyawan untuk bagian administrasi dari luar Desa dikarenakan masyarakat Desa

Duren Sewu tidak ada yang bisa mengurus keadministrasian sehingga secara terpaksa mencari orang yang ahli dari luar desa dengan cara membuat pengumuman lowongan kerja yang disebar di sekitar daerah Pandaan.

Sehingga pertimbangan secara administrasi, kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah Desa, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yaitu atas dasar pertimbangan kurangnya anggaran, kemampuan manajemen, sumber daya manusia (SDM) serta aset yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwasannya kemitraan yang dijalankan antara Pemerintah Desa, Swasta dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu dengan menggunakan teori dasar pertimbangan yang menonjol adalah alasan ekonomis karena semua pihak disini ingin mewujudkan kesejahteraan (Saputra et al., 2019).

Selanjutnya untuk menganalisis pola kemitraan antara Pemerintah Desa, Swasta dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan menggunakan teori Sulityani (2017:130) yaitu: pola kemitraan Mutualistik, kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari akan pentingnya melakukan kerjasama dan saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

Kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang sama dan menjalankan peraturan tertentu serta menanggung resiko dan keuntungan secara bersama-sama. Kemitraan merupakan adaptasi dari kata *partnership* dan akar kata dari *partner* yang berarti pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon dan *partnership* diartikan sebagai persekutuan atau perkongsian (Melyanti, 2014). Kerjasama antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat ini telah melalui proses yang sudah disepakati dan disetujui bersama tentunya dengan ketiga pihak baik kesepakatan itu tertulis maupun tidak tertulis. Kemitraan akan berlangsung lama apabila kemitraan yang telah dijalankan menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan, maka terdapat pola kemitraan yang telah dijalankan selama ini antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu. Pemerintah Desa dengan masyarakat melakukan kemitraan dengan cara membuka saham khusus untuk masyarakat Desa Duren Sewu sendiri dengan besar Rp. 1.000.000/saham yang mana saham tersebut sekarang terdapat 50 orang yang ikut dan hasil saham tersebut akan di bagikan setiap tahunnya. Kemitraan ini dilakukan hanya dengan masyarakat Desa Duren Sewu dikarenakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Selain itu Pemerintah Desa juga melakukan kemitraan dengan cara merekrut masyarakat Desa untuk bekerja di arena wisata Telaga Sewu yang ditempatkan diberbagai bidang sesuai dengan keahliannya, yang mana

jumlah orang yang direkrut ada 52 orang karyawan berasal dari Desa Duren Sewu serta mengizinkan masyarakat untuk berjualan di arena Wisata Telaga Sewu baik di dalam arena Wisata Telaga Sewu bagi orang pemilik saham maupun luar arena Wisata Telaga Sewu bagi yang tidak memiliki saham. Dengan itu maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian, yang mana dulu masyarakat Duren Sewu kehidupan perekonomiannya sangat terbatas, dengan mata pencaharian rata-rata sebagai petani mengakibatkan warganya kurang sejahtera dan tertinggal.

Masyarakat Desa Duren Sewu telah merasakan keuntungannya dengan adanya kemitraan yang telah dijalankan ini sebagaimana hasil wawancara dengan Mas Taufik yang mengatakan bahwa adanya kemitraan ini beliau mendapatkan pekerjaan yang mana sebelumnya adalah seorang pengangguran. Hal ini juga dirasakan oleh Ibu Khotimah, beliau juga mendapatkan pekerjaan sehingga dapat membantu keuangan keluarga yang sebelumnya mengalami kekurangan perekonomian dan mengalami kesulitan untuk membiayai anak sekolah.

Kemudian Pemerintah desa dengan pihak kolam melakukan kerjasama menyewa tanah kas Desa ke Pemerintah Desa karena kepemilikan wisata Telaga Sewu ini sampai sekarang adalah kepemilikan desa, hanya saja dialihfungsikan sehingga menjadi struktural dalam pengurusannya. Adapun penyewaan tanah Kas Desa ini dengan jangka waktu 20 tahun dengan biaya sewa Rp. 1.050.000/1.000 m²/tahun dan dikembalikan lagi dalam keadaan baik seperti semula jika jatuh tempo waktu ditentukan. Sedangkan tujuan perjanjian bersama ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi desa Duren Sewu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

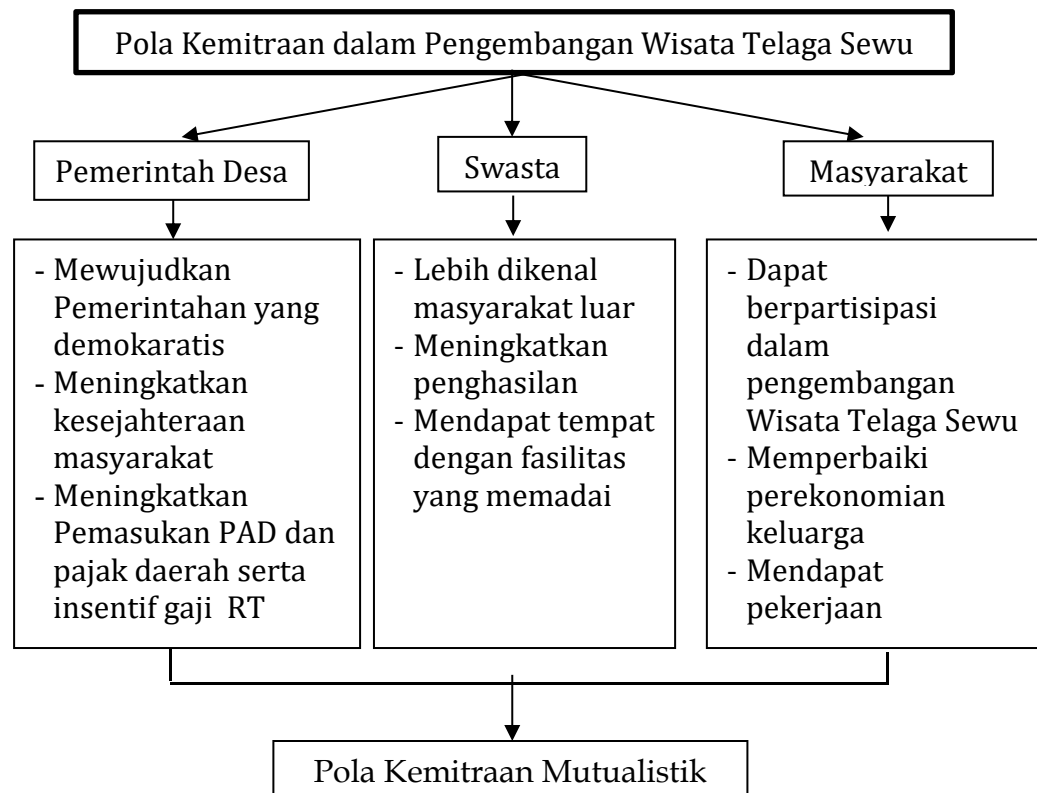
Kemitraan dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama *outbound* dengan provider-provider diantaranya, yaitu *Sherpa Camp, Flymbre, Nilla, AFG, Lawu Adventure* dll. Wisata Telaga Sewu menyediakan pelayanan yang baik pada penanam modal dan berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif yang mana ini dapat dipercaya oleh pihak provider untuk melakukan kerjasama. Dalam kerjasama ini terdapat kontrak karena untuk menghindari kecurangan-kecurangan dan kontrak kerjasama ini harus memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Dalam kemitraan ini Wisata Telaga Sewu mendapatkan penghasilan dari tiket masuk pengunjung yang akan melakukan *outbound*.

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila disandingkan dengan teori yang ada, maka pola kemitraan yang berjalan antara Pemerintah Desa Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu adalah pola kemitraan mutualistik. Sebab disini semua pihak mencari keuntungan dan memperoleh keuntungan satu sama lain dengan dilakukan kemitraan ini. Pemerintah desa melakukan kemitraan ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa dengan kontribusi sebesar Rp. 8.000.000/bulan dan pajak daerah melalui DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kabupaten Pasuruan Rp. 3.000.000,00/ Bulan dan di gunakan untuk gaji insentif para RT serta distribusikan untuk anak yatim yang diberikan kepada 7 anak yatim yang bersekolah SD-SMP masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000/bulan dan ibu janda, serta orang miskin sehingga dengan ini dapat mensejahterakan masyarakatnya dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Sedangkan swasta dengan melakukan kemitraan ini memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dan lebih terkenal kepada masyarakat luar karena dapat respon yang baik dari pengunjung serta mendapatkan tempat dengan pelayanan yang baik dan fasilitas yang memadai. Adapun masyarakat melakukan kemitraan ini dapat ikut partisipasi dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu dan meningkatkan pendapatan keluarga dengan dapat berkerja dan berjualan di arena wisata Telaga Sewu dan mendapatkan bagian saham pertahunnya.

Dari Pemaparan diatas dan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, maka dapat digambarkan bagaimana pola kemitraan antara Pemerintah Desa, swasta, dan masyarakat dalam pengembanagan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten pasuruan, sebagai berikut:



Gambar 4.3 Pola Kemitraan Pemerintah Desa, Swasta dan Masyarakat

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dasar pertimbangan kemitraan antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, yaitu: 1) Alasan politik, semua pihak melakukan kemitraan atas dasar kepentingan mendapatkan keuntungan. Pemerintah Desa dapat meningkatkan mewujudkan Pemerintah yang demokratis, sedangkan swasta dapat meningkatkan penghasilan dan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan atau perekonomian keluarga. 2) Alasan ekonomis, yang mana melakukan kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Duren Sewu, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan. 3) Alasan administratif, Pemerintah desa melakukan kemitraan karena terkendala kekurangan anggaran pembangunan wisata Telaga Sewu, Sedangkan swasta melakukan kemitraan dikarenakan tidak memiliki alat yang lengkap, serta merekrut masyarakat sebagai karyawan di Wisata Telaga Sewu dikarenakan kurangnya sumber daya alam.

Pola Kemitraan antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Sewu di Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah pola kemitraan mutualistik. Dimana semua pihak merasakan mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan dalam kemitraan yang dilakukan. Pemerintah Desa dapat meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberi insentif RT, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan swasta atau provider *outbound* mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi serta Masyarakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka rekomendasi yang diberikan diantaranya: 1) Pemerintah Desa Duren Sewu harus membuka jaringan dengan sektor swasta lain tidak hanya dengan provider *outbound* saja agar dapat lebih meningkat kualitas Wisata Telaga Sewu. 2) Kemitraan antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat seharusnya ada dokumen tertulis tentang hasil yang diperoleh dari kemitraan yang dijalankan. 3) Kerjasama harus terjalin dengan baik antara Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat.

Daftar Pustaka

- JDIH BPK RI. (2014). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. BPK RI.
- JDIH Kabupaten Pasuruan. (2010). *Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa*.
- JDIH Kabupaten Pasuruan. (2009). *Pertaturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Strategis Peraturan Daerah ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2018. In Peraturan Bupati*.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.

- Melyanti, I. M. (2014). Pola kemitraan pemerintah, civil society, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Rudi, R., Hakim, L., & Mone, A. (2017). Kemitraan Pemerintah Dengan Asita Dalam Promosi Kunjungan Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 95–111.
- Saputra, G. R., Zaenuri, M., Purnomo, E. P., & Fridayani, H. D. (2019). Kemitraan Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 298–341.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Wahono, P., Karyadi, H., Suhartono, S., Prakoso, A., Prananta, R., & Lokaprasida, P. (2017). Prospek Ekonomi Pengembangan Potensi Lokal Dalam Mendukung Pengelolaan Wisata Di Wilayah Sekitar Gunung Bromo. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 11(2), 195–216.
- Widodo, J. (2001). *Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Insan Cendekia surabaya.